

KEHORMATAN JURNALISME

Masmimar Mangiang *

Wartawan membicarakan banyak hal, menyangkut orang banyak dan menyebut-nyebut banyak orang. Karena itu, di banyak tempat, banyak orang merasa bahwa banyak yang harus dilakukan terhadap wartawan dan medianya, mulai dari penataran, pengaturan, breidel, sampai aksi kekerasan. Dunia tak pernah bebas dari persoalan ini. Dalam masa yang panjang, kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi menjadi topik perdebatan tak berkesudahan. Kebebasan harus terus diperjuangkan. Ini adalah jalan tak berujung.

Kebebasan wartawan dan medianya bisa dihancurkan dari luar dan dapat dirusak dari dalam. International Press Institute (IPI) yang mempelajari kualitas kebebasan itu menemukan banyak kenyataan tidak menyenangkan sepanjang tahun 2002: 54 wartawan terbunuh, dan terjadi aksi kekerasan terhadap jurnalis serta medianya di 176 negeri.

Gangguan dari luar itu bertambah sesudah peristiwa World Trade Center, New York (11 September 2001), yang mencetuskan perang melawan terorisme global dan melahirkan akibat merugikan bagi kebebasan pers. Pemerintah di berbagai negara menjadikan issue perang melawan terorisme ini sebagai justifikasi kepentingan jangka pendek mereka. Kriteria keamanan dan gangguannya digariskan bersama terbitnya aturan yang mengekang. Pada saat itu kebebasan arus informasi direduksi. Kemungkinan menahan wartawan atau membungkamkan media massa jadi terbuka. Semua itu berlangsung atas nama perang melawan terorisme. Itu, menurut IPI, sekarang terasa di Uzbekistan, Hong Kong, Malaysia, Filipina, dan India. Indonesia termasuk di dalamnya.

Oleh IPI kebebasan pers di Asia sepanjang 2002 dinilai merosot serius. Tidak ada tanda-tanda realisasi hak azasi manusia akan membaik di negeri-negeri pecahan Uni Soviet di wilayah Asia. Kehadiran Amerika Serikat (AS) di Asia Tengah -- katanya untuk demokratisasi dan memerangi terorisme-- tampaknya akan melahirkan dampak yang berkebalikan dengan hasrat menegakkan demokrasi itu.

Wartawan Uzbekistan misalnya, harus melakukan *self censorship*. Karena berharap akan masuknya investasi AS di sektor minyak dan gas bumi, dengan membantu memerangi terorisme, pemerintahan Kazakh tak ragu-ragu membatasi kemerdekaan media dan membuat pengawasan ketat terhadap jurnalis. Serangan fisik serta ancaman tentara AS dan Inggris yang mencegah jurnalis menginvestigasi aksi mereka, dihadapi wartawan di Afghanistan. Ada "Hukum Pers" yang dapat merintangai kebebasan media di negeri itu. Di Tajikistan hukum dipergunakan untuk membatasi keleluasaan pers. Di Nepal, tahun 2002 menjadi tahun traumatik, ketika wartawan berupaya menulis laporan yang lebih bebas perihal konflik pemerintah dengan pemberontak Maois. Di bagian timur Asia, sejak menyiapkan kongres ke-16 Partai Komunis, November 2002, pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) bersikap kian keras terhadap media. *Internet cafe* ditutup dan *web site* dibatasi terkoneksi hanya di daratan Cina. Wartawan yang membuat laporan tentang korupsi aparaturnya berhadapan dengan hukuman penjara. UU Penyiaran, UU Antiterorisme dan UU Rahasia Negara di Indonesia dikhawatirkan akan memunculkan kembali represi terhadap pers. Kekerasan

terhadap wartawan oleh aparat keamanan maupun warga sipil di Indonesia, bukanlah pula cerita baru.

Kekerasan seperti itu bagaikan sangat biasa di Amerika Latin, Afrika, dan di kawasan konflik Timur Tengah. Pekerjaan wartawan terasa begitu berbahaya kalau disadari bahwa dalam tiga setengah bulan pertama 2003 ini 21 jurnalis tewas di Kolombia, India, Thailand, dan di Irak (yang mencatat porsi terbesar dalam jumlah ini: 14 orang) seperti dilaporkan IPI. Pada 2002, 56 wartawan terbunuh di 19 negara, 15 diantaranya tewas di Kolombia. Dalam tahun 2001, 55 jurnalis mati di 28 negara karena pekerjaannya. Angka yang tinggi dicatat oleh Kolombia (11) dan Afghanistan (8). Indonesia menyumbangkan satu korban. AS, Perancis, Inggris, dan Spanyol turut serta dalam daftar ini.

Kendati bukan negeri yang aman, Indonesia belakangan ini sudah mencatat penurunan angka kekerasan terhadap wartawan. Seperti terungkap dalam sebuah seminar yang diselenggarakan South East Asian Press Alliance (SEAPA), hingga November 2002 “hanya” ada 56 kasus. Tahun 2001 membukukan 95 kasus, sedangkan tahun 2000 dengan 115 kejadian. Tetapi penelitian SEAPA menemukan bahwa kini warga sipil “lebih ganas” dari alat negara. Kekerasan terbanyak dilakukan oleh anggota parlemen disusul oleh aparat pemerintah, kemudian personil TNI, dan massa. Mahasiswa turut pula sebagai pelaku walau hanya untuk dua kasus. Dengan angka ini saja peringkat kebebasan pers Indonesia sudah membaik dibandingkan dengan Filipina dan Thailand.

*

Pengekangan gerak wartawan, rintangan terhadap arus informasi, aksi fisik terhadap jurnalis dan media adalah keadaan luar yang memprihatinkan. Ia harus dilawan dan wartawan harus turun ke “gelanggang pertempuran”. Tapi apakah fair berbicara tentang kebebasan pers jika yang dilihat hanyalah bahaya yang datang dari luar diri wartawan dan media massa belaka? Ada gelanggang pertempuran lain yang di situ wartawan harus “berperang” menghadapi dirinya sendiri. Ancaman terhadap kebebasan yang muncul dari diri wartawan atau dari media sendiri tidaklah kalah merisaukan.

Sering dikatakan bahwa menghalangi kerja wartawan adalah menciderai hak publik akan informasi. Tapi pernahkah publik mempergunakan haknya itu, menentukan dan menagih apa yang hendak ia ketahui? Yang terjadi adalah wartawan dan media memilih informasi untuk disajikan kepada publik. Kalaupun ada *survey* selera *audience*, yang dipelajari *survey* itu adalah arah keinginan khalayak. Itu pun dilakukan lebih banyak untuk tujuan memotret pasar secara jelas, buat merintis sukses penjualan.

Siapakah publik yang kepentingannya dinyatakan sebagai dibela oleh wartawan dan media? Publik itu bisa berarti pasar yang menghidupi industri pers. Untuk media cetak di Indonesia, publik yang jadi pasar itu --*audience* dan pemasang iklan-- adalah sebagian kecil kalangan urban. “Publik” dalam jurnalistik adalah terminologi yang dapat berupa berbagai lingkup. Pada suatu saat, ia hanya para pemburu *gain* di bursa saham, di saat yang lain ia cuma warga Jakarta penghuni bantaran kali. Publik itu juga dapat berarti hanya pemeluk Hindu, pendukung partai politik tertentu, dokter, hakim atau para pedagang di Glodok saja. Di saat

yang lain ia sungguh-sungguh tak terbatas, manusia, yang tidak dibedakan oleh umur, jenis kelamin, kasta, profesi, ras, bangsa, maupun agama. Dalam melayani mereka wartawan harus mengerti, persoalan apa dan mengenai publik yang mana.

Karena itulah laporan media massa tak mungkin memenuhi keinginan atau memuaskan semua orang. Itulah yang mengharuskan wartawan arif menentukan pilihan. Yang dapat menolong jurnalis dan medianya di situ adalah pemahaman yang baik akan konsepsi “kepentingan publik” dan “hal-hal yang menarik bagi khalayak”, dasar ukuran nilai berita.

Kepentingan publik adalah alasan terkuat bagi hidupnya jurnalisme, dan karena itu media menjadi institusi sosial. Tetapi keharusan menghidupi diri memaksa wartawan dan medianya menjual informasi --komoditi-- serta mencetak laba. Pada saat itu media adalah institusi bisnis. Manakala pertimbangan “kepentingan publik” kalah oleh pertimbangan “hal-hal yang menarik bagi khalayak”, jurnalis dan medianya bisa hanya memperdagangkan bahan publikasi pemuas nafsu bergunjing, atau jadi pelayan angan-angan syahwat setiap orang, atau pemuas bakat mencerca yang juga sangat manusiawi. Yang menjadi kunci di situ adalah keterikatan pada apa yang disebut sebagai nasib orang banyak, keyakinan bahwa pekerjaan itu dilakukan demi peradaban, dan kesadaran memilih itu tadi.

Pilihan dibuat oleh wartawan ataupun media. Walau ada ukuran-ukuran jurnalisme yang menjadi pegangan dalam membuat pilihan itu, pada akhirnya wartawan atau media adalah yang jadi penentu. Oleh karenanya hasil dari pilihan itu selalu subjektif, dan objektivitas menjadi *nonsense*. Sekali wartawan atau media memilih atau menentukan apa yang ditulis dan apa yang tidak, memutuskan laporan “A” di halaman depan dan laporan “B” di halaman dalam, ia sudah bertindak subjektif. Tapi subjektivitas bukanlah dosa, selama kenyataan yang disampaikan itu dikemukakan secara berimbang dan *fair*. Jurnalisme hanya bisa sampai di situ, pada taraf subjektif yang *fair*, jujur melihat segenap kenyataan.

Kejujuran adalah modal terpokok bagi jurnalis. Ia melebihi syarat apa pun yang harus dipenuhi untuk profesi ini. Tanpa memperhitungkan kejujuran jurnalis, jurnalisme tak akan mengenal istilah *off the record* atau *not for attribution* yang diminta narasumber yang menaruh kepercayaan. Hanya saja tak ada sekolah dan pelatihan yang dapat mentransfer kejujuran satu orang kepada orang lain. Kejujuran itu ada dan tumbuh bersama manusianya. Itu adalah hati nurani.

Adalah nurani yang membuat orang punya komitmen. Komitmen berarti integritas, dan itu merupakan keputusan pribadi. Ia adalah akar kebebasan atau kebebasan itu sendiri. Itulah kehormatan jurnalisme. Untuk wartawan “yang sesungguhnya” atau “media yang sebenarnya” kebebasan bersifat “tak boleh tidak”, dan ia harus tidak tergoyahkan.

Tetapi memelihara komitmen sangatlah sulit terlebih-lebih ketika menemukan kenyataan yang menyentuh perasaan dan kepentingan si wartawan sebagai manusia biasa. Komitmen juga tak mudah dipertahankan ketika ada keharusan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. Kebebasan yang direduksi diterima wartawan dan banyak penerbit di Indonesia ketika ia menjadi pendukung “revolusi” Bung Karno pada 1960-an, atau menjadi pers pembangunan yang harus

memelihara stabilitas sepanjang sejarah orde baru. Kita pernah “lupa” bahwa kesulitan memelihara komitmen tidak sewajarnya membuat komitmen itu terabaikan.

Kemerdekaan pers dari dulu diganggu oleh yang namanya *political constraint* dan *economic constraint*. Rintangan politik dapat mencegah jurnalis mengatakan kenyataan seperti kenyataan itu sesungguhnya. Pertimbangan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan media membuat pilihan. Memberikan *coverage* “bagus” buat memancing iklan, melunturkan kebebasan. Juga bukanlah kejujuran ataupun komitmen yang diperlihatkan apabila keputusan menolak iklan rokok, minuman keras, atau obat tertentu dibuat setelah pemasukan iklan sudah dirasa aman dengan iklan lain di luar produk itu.

Selagi berbicara tentang ancaman terhadap kebebasan pers yang datang dari luar, adalah masanya sekarang wartawan dan media menilik kembali potret dirinya. “Budaya” ampelop adalah kebiasaan yang akan meruntuhkan kebebasan sekalipun ia dinyatakan sebagai pemberian tidak mengikat. Hubungan erat “sangat bersahabat” --yang disembunyikan di belakang istilah *lobby*-- antara editor dengan pengusaha, politikus, atau pejabat tertentu dapat membuat si editor kehilangan dirinya sebagai jurnalis. Berpangkalan terlalu lama dan menjadi anggota wartawan unit “X” atau unit “Y” seperti yang kini terpelihara baik, dapat merusak kebebasan.

Musuh kebebasan pers ada di luar dan di dalam diri wartawan serta medianya. Membiarkan diri tak sanggup membicarakan kebenaran karena pertimbangan kedekatan dan hubungan baik, sama berbahayanya dengan membiarkan adanya regulasi yang membatasi kemerdekaan. Memaki seraya melempar wartawan dengan kotak *tissue* adalah perbuatan yang sama laknatnya dengan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara bagi pengelola internet yang memetik artikel dari *website* mancanegara, dan mengganggu kenyamanan kekuasaan partai komunis seperti yang terjadi di Beijing. Kedua-duanya harus diperangi, walau kita tahu bahwa kemenangan mutlak tak akan mungkin diraih di gelanggang pertempuran itu. Kemerdekaan pers tak bisa ditemui. Ia hanya bisa didekati. Berharap semua rintangan kebebasan pers sirna sama sekali, sama dengan mengharap Tuhan tidak lagi menghadirkan setan di tengah umat manusia.

* Wartawan, pengajar pada Departemen Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia